

Nama NIP

Jabatan Alamat

## KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital. Makin Maju

: Pejabat Pembuat Komitmen BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

: Jl. Merdeka Barat No. 9, Jakarta

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3504024 www.kominfo.go.id

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor: 5/PPK-SJ.6/SPK/I/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NI -	NAMA JENIS BARANG/JASA	SATUAN	SATUAN	JUMLAH	ĺ	
No.	NAMA IFNIC DADANC/JACA	CATHAN	HARGA			
	PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 1 PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK P PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan ba	KEDUA, dan	PIHAK KEDUA m			
l.		: Jl. Palmerah selatan no 21 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama <b>PT Kompas Media Nusantara</b> , selanjutnya d				
	Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitme Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas na disebut PIHAK PERTAMA (I).	di Lingkung	an Kementerian K	Komunikasi dan Digital,		

Terbilang : (Seratus sembilan puluh semilan juta delapan ratus ribu rupiah)

2 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perintah Kerja ini hingga BAST tanggal 21 Januari 2025.

Jumlah

199.800.000

Rp

- 3 PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp199.800.000 (Seratus sembilan puluh semilan juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk PPN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I atas nama PT Kompas Media Nusantara yang mempunyai Rekening pada Bank BCA Nomor Rekening: setelah pekerjaan/barang/jasa diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 4 Apabila Jangka waktu pelaksanaan tersebut angka 2 dilampaui, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda/ganti rugi sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari maksimum 5 % dari nilai SPK. Apabila telah mencapai angka 5%, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan SPK secara sepihak dan segala kerugian akibat pembatalan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- 5 Barang/jasa yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dalam keadaan baik, baru, cukup satuan maupun jumlahnya, berfungsi secara sempurna.
- 6 PIHAK PERTAMA berhak menolak barang/jasa yang diserahterimakan dari PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja ini dan PIHAK KEDUA wajib mengganti barang/jasa dimaksud sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
- 7 Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam SPK ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-059-01.1.664241/2025 tanggal 30 November 2024.
- 8 SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, salinan dapat dibuat menurut kebutuhan.

